

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT TERDAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI GUYANGAN DI KELURAHAN GUYANGAN KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

Jefri Prasongko

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Jefriprasongko33@gmail.com

Dr. Agus Prastyawan, S. Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
prastyawanagus@gmail.com

Abstrak

Masalah sosial merupakan suatu masalah yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, salah satu bentuk masalah sosial adalah prostitusi, seperti Lokalisasi Guyangan yang dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi. Masyarakat banyak yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi ini. Setelah Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi menutup kawasan tersebut, warga terdampak merasa terancam kesejahteraan perekonomiannya. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan pada warga terdampak penutupan lokalisasi Guyangan di Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan yang mencakup 7 tahapan proses pemberdayaan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Fahrudin (2011). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Lokalisasi Guyangan Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari teori proses pemberdayaan Fahrudin dengan tujuh tahapan yaitu: 1) Tahap persiapan, dengan sosialisasi tentang pemberdayaan kemudian dilanjutkan pada pembentukan tenaga pendamping dan penyiapan materi pelatihan, 2) Tahap pengkajian, pada tahapan ini pengelompokan peserta pelatihan sesuai dengan minat, 3) Tahap perencanaan alternative program, pemberdayaan pada warga terdampak dengan pemberian pelatihan, 4) Tahap formulasi rencana aksi, warga terdampak dapat menerima manfaat dari adanya pemberdayaan dengan maksud mereka dapat melanjutkan roda perekonomian mereka, 5) Tahap pelaksanaan program, semua kebutuhan teknis sudah dipersiapkan oleh agen pemberdayaan, warga terdampak hanya mengikuti arahan kemudian, 6) Tahap evaluasi, agen pemberdayaan melakukan rapat koordinasi dan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan, 7) Tahap terminasi, warga terdampak belum bisa dilepas sepenuhnya dan pemerintah berharap dapat mengembangkan pemberdayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sudah melakukan pemberdayaan sebagai jawaban atas penutupan lokalisasi Guyangan. Dan peneliti memberikan saran, 1) memonitoring segala bantuan yang diberikan pada warga terdampak, 2) melakukan channeling untuk meningkatkan marketing peserta pemberdayaan, 3) pengawasan agar mereka tidak kembali ke lokalisasi.

Kata kunci : *Masalah Sosial, Pemberdayaan, Lokalisasi*

Abstract

Social problem is a problem that is not in accordance with the values and norms that develop in society, one form of social problems is prostitution, such as Lokalisasi Guyangan used as a place of prostitution. Many people rely on this localization. After the Nganjuk Government officially closed the area, residents affected felt threatened their economic welfare. The researcher aims to describe the process of empowerment of citizens affected by the closure of localization of Guyangan in Guyangan Subdistrict, Bagor District, Nganjuk District. The focus of this research is how the empowerment process that includes 7 stages of empowerment process based on the theory put forward by Fahrudin (2011). This research uses descriptive research type using qualitative approach. The location of this research in the Localization Guyangan District Guyangan District Bagor District Nganjuk. The data source consists of primary and secondary data collected by data collection techniques through interviews, observations and documentation. Data analysis techniques in this study using

interactive data model analysis consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study show that in view of the theory of Fahrudin empowerment process with seven stages are: 1) Preparation stage, with socialization about empowerment then continued on the formation of co-workers and preparation of training materials, 2) Assessment stage, at this stage the grouping of trainees in accordance with Interest, 3) Alternative program planning stages, empowerment of affected people by providing training, 4) Formulation stage of action plan, affected residents can benefit from empowerment with the intention that they can continue their wheel of economy, 5) Program implementation phase, all technical needs Has been prepared by the empowerment agency, the affected residents only follow the direction later, 6) The evaluation phase, the empowerment agency conducts coordination meetings and is directly involved in the empowerment process, 7) The termination phase, the affected citizens can not be fully separated and the government hopes to develop empowerment. So it can be concluded that the Government has done empowerment in response to the closure of the localization of Guyangan. And the researchers provide suggestions, 1) monitoring all the assistance provided to affected people, 2) channeling to improve the marketing of the empowerment participants, 3) supervision so that they do not return to lokalisasi.

Keywords: *Social Problems, Empowerment, Localization*

PENDAHULUAN

Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sosiologi menyangkut teori yang hanya dalam batas tertentu menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. (soekanto, 2010) masalah-masalah sosial tersebut berbeda dengan problema-problema lainnya di dalam masyarakat karena masalah-masalah sosial tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkutan paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan yang normatif. Hal ini dinamakan masalah karena bersangkutan paut dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat.

Klasifikasi yang berbeda mengadakan penggolongan atas dasar kepincangan-kepincangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijaksanaan sosial. Klasifikasi ini lebih luas ruang lingkupnya daripada klasifikasi yang terdahulu. (soekanto, 2010) kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat masyarakat yang pada umumnya sama, salah satunya yaitu, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Menurut soekanto (2010) wujud dari pelanggaran terhadap norma masyarakat seperti pelacuran. Pelacuran dapat diartikan

sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.

Lokalisasi Guyangan kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kawasan yang dijadikan perbuatan-perbuatan seksual oleh para pekerja seks komersial (PSK) baik dari wilayah Nganjuk sendiri ataupun dari urbanisasi yang mencari pekerjaan. Mereka datang ke lokalisasi guyangan untuk memperbaiki kondisi perekonomian masing-masing. Secara sosiologis, urbanisasi merupakan perubahan atau peralihan dari pola pikir dan pola perilaku perdesaan (rural) menjadi pola pikir perilaku perkotaan (urban).

Setelah penutupan lokalisasi Guyangan, wanita tuna susila yang telah didata akan diberi kompensasi sebesar Rp. 4.800.000,- dan pelatihan memasak dan menjahit. Warga sekitar lokalisasi guyangan merasa terancam kesejahteraan perekonomian dan sosial setelah pemerintah kabupaten Nganjuk menutup lokalisasi tersebut. Pemkab Nganjuk menyadari bahwa menutup sebuah lokalisasi tidaklah mudah dan pasti banyak pro-kontra mulai dari beberapa lapisan masyarakat, dan bukan hanya sekedar menghakhir sebuah bisnis prostitusi dalam lokalisasi, melainkan juga memikirkan apa yang akan dilakukan setelah lokalisasi resmi ditutup. Karena tidak sedikit dari warga yang menggantungkan hidupnya kepada lokalisasi guyangan.

Sasaran prioritas dari program pemberdayaan ini adalah warga terdampak penutupan lokalisasi guyangan, pembekalan ketrampilan dan keahlian akan dibina untuk dapat hidup bermasyarakat dan bekerja sesuai dengan ketrampilan masing-masing, sehingga proses penutupan lokalisasi Guyangan tidak hanya terkesan mematikan roda perekonomian beberapa lapisan masyarakat, namun juga ada wujud nyata untuk memberdayakan warga

terdampak penutupan lokalisasi tersebut lewat pembinaan ketrampilan menjahit dan memasak.

Melihat dari data penutupan suatu lokalisasi berdampak langsung bagi masyarakat maka suatu pemberdayaan masyarakat wajib dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian maupun secara sosial bagi masyarakat. terlalu mengkhawatirkan apabila penutupan suatu lokalisasi tidak diiringi dengan suatu pemberdayaan. karena beberapa masyarakat juga menggantungkan kehidupannya dalam lokalisasi. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan menjadi harapan baru masyarakat untuk melanjutkan atau bahkan memperbaiki roda perekonomian bagi masyarakat yang terdampak penutupan suatu lokalisasi. Dengan kata lain pemerintah bukan hanya memikirkan bagaimana suatu lokalisasi ditutup melainkan harus memikirkan bagaimana cara membebrdayakan masyarakatnya yang menjadi korban terdampak penutupan suatu lokalisasi.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dengan menceritakan, menggambarkan kondisi masyarakat dalam situasi tertentu tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan disusun secara runtut masalah yang terjadi dilapangan.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi atau catatan lapangan, data pribadi serta dari hasil dokumentasi resmi lainnya. Pada pendekatan kualitatif, data yang diperoleh bersifat menggambarkan realita dan fenomena yang di rinci secara tuntas. Dalam pengambilan sampel data pada penelitian kualitatif harus dipergunakan secara hati-hati untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu penelitian kualitatif ini akan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku secara deskriptif.

Fokus penelitian merupakan pokok pembahasan yang utama dalam penelitian ini. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi bagi seorang peneliti sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian, yaitu proses pemberdayaan melalai pelatihan keterampilan masyarakat terdampak penutupan lokalisasi guyangan di kelurahan guyangan kecamatan bagor kabupaten nganjuk ini meliputi proses pemberdayaan yang mencakup 7 tahapan proses pemberdayaan sebagai fokus dari penelitian ini. Teori yang dikaji dikemukakan oleh Fahrudin (2011) yaitu meliputi tahap persiapan (*engagement*), tahap pengkajian (*assessment*), tahap perencanaan *alternative program* atau kegiatan (*designing*), tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan program atau kegiatan, tahap evaluasi, serta tahap terminasi (*dissanggement*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tahap persiapan (*engagement*)

Hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa agen pemberdayaan yaitu dinas sosial kabupaten nganjuk telah melakukan langkah-langkah persiapan dengan baik. Pada tahapan awal terlihat bahwa dinas sosial melakukan langkah-langkah persiapan internal menentukan tempat beserta izinya, sumberdaya manusia atau tenaga ahli seperti pelatih dan kader pendamping sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan juga anggaran untuk melakukan proses pemberdayaan bagi warga terdampak penutupan lokalisasi guyangan.

Koordinasi yang dilakukan oleh agen pemberdaya terkait tempat pelaksanaan pelatihan dengan pihak kecamatan maupun kelurahan sangat baik sehingga memudahkan persiapan yang dilakukan. Untuk pelatihan biasanya diselenggarakan di gedung kelurahan, kemudia di gedung yang berada dilokalisasi guyangan itu sendiri dan dirumah warga yang telah diizinkan. Serta pendataan informasi personal diambil melalui kecamatan sehingga tepat dalam menetapkan kuota dan warga mana yang diundang pelatihan. Persiapan yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama yakni kurang lebih satu minggu.

Selain melakukan persiapan petugas pelatihan dan kader pendamping, dibutuhkan juga persiapan teknis dilapangan seperti alat dan bahan, materi dan lain-lain. Persiapan merupakan prasyarat sukses atau setidaknya sebuah program pemberdayaan berlangsung, oleh karena itu diperlukan pendekatan kepada masyarakat, ada pula yang menjamin keakraban dengan warga sehingga tidak hanya diterima tapi juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka dapat merubah kualitas hidupnya.

b. Tahap pengkajian (*assessment*)

Pada tahap pengkajian yang telah dilakukan indentifikasi kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki warga terdampak yang diberikan oleh dinas sosial sehingga sesuai minat atau potensi warga terdampak. Rata-rata warga terdampak ini didominasi oleh para ibu-ibu rumah tangga dimana pelatihan yang diberikan bisa dilanjutkan dengan pembentukan kelompok yang mana nantinya ketika mulai berproduksi bisa dikerjakan dirumah masing-masing. Selain tenaga, rumah mereka menjadi modal fisik yaitu sebagai tempat produksi secara pribadi.

Selain modal fisik, dinas sosial juga menyaranakan untuk kepada warga terdampak agar selalu mengutarakan keluhan atau permasalahan mereka agar pihak dinas sosial sendiri sebagai agen pemberdayaan mengetahuinya.

Dengan uang kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten nganjuk berharap mereka mampu memaksimalkannya misalnya di bidang kewirausahaan, sehingga dengan usaha baru yang mereka geluti dapat menunjang ekonomi sehari-hari. Ada rasa khawatir dari pemerintah jika nanti mereka kembali menggikuti pekerjaan lama sewaktu dilokalisasi guyangan. Namun dengan usaha yang keras pemerintah benar-benar melakukan langkah pemberdayaan dengan baik.

Namun, ada pula bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga yang sudah memiliki usaha, seperti penambahan bahan produksi namun tidak dimanfaatkan dengan baik, dan mereka masih merasa kurang akan apa yang diberikan oleh pemerintah. Memang ada perlunya pengkajian yang tepat bagi penerima bantuan agar tidak terjadi pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.

Para peserta pelatihan yang telah mendapatkan pemberdayaan, secara umum telah dapat melakukan transformasi secara perlahan dalam kehidupannya. Seperti ibu ratih yang mampu mengembangkan usaha ternak lelenya melalui peningkatan kualitas. Adanya penguatan (*empowerment*) seperti memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka (Huraerah, 2011). Penguatan tersebut dilakukan oleh pihak agen pemberdaya dengan menjalin komunikasi dan pertemuan untuk membicarakan kebutuhan apa yang memerlukan tindakan tanpa membuat masyarakat bergantung. Pada bantuan pemerintah karena tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah menciptakan masyarakat yang mandiri.

Temuan dilapangan bahwa para warga terdampak yang sudah mulai menjalani usaha baru untuk membicarakan kebutuhan dan perkembangan usaha yang sedang dijalani dilakukan melalui pertemuan yang diadakan setiap bulanya bersama RT dan agen pemberdaya yaitu dinas sosial. Hal tersebut menunjukkan besar dari pengaruh penguatan untuk menjaga keyakinan dan kemauan warga dalam menjalankan usahanya. Upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki warga terdampak serta berupaya mengembangkannya adalah suatu hal penting agar pemberdayaan berjalan sesuai dengan perencanaan nantinya.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (*designing*)

Program pemberdayaan sebagai program yang bertujuan mengalihkan profesi dan mengalihkan fungsi kawasan dilokalisasi guyangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten nganjuk merupakan suatu program yang sudah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Meskipun program ini direncanakan oleh pemerintah, bukan menutup kemungkinan pihak-pihak lain dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah kabupaten nganjuk tentunya memiliki informasi yang luas terkait permasalahan dan kebutuhan warga terdampak penutupan lokalisasi guyangan melalui survey-survey dimana dalam survey tersebut masyarakat turut memberikan jawaban. Saat pelatihan maupun pendampinganpun warga terdampak bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Penyusunan rencana kelompok dimaksudkan agar kelompok dan anggotanya mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan yang konkrit dan realistis. Dasar penyusunan adalah potensi dan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi dalam tahap pengkajian. Pemberian pelatihan juga diperlukan

pendampingan pasca kegiatan pelatihan bahkan pelatihan pemantapan-pemantapan juga diperlukan agar para warga terdampak dapat berkembang dan memulai usaha barunya.

Namun pada nyatanya tidak semua warga terdampak berkenan dengan program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten nganjuk. Maka dari itu pemerintah memberikan alternatif kebebasan pada warga terdampak untuk menggunakan dana kompensasi yang ada dengan baik, sesuai apa yang mereka kehendaki. Itulah alternatif yang diberikan oleh pemerintah kabupaten nganjuk, sementara ada info lowongan kerja juga yang diberikan oleh disnaker, dengan tujuan membantu pemerintah agar warga terdampak tidak lagi kembali pada mata pencaharian lama dilokalisasi guyangan.

d. Tahap formulasi rencana aksi

Penetapan masalah yang telah teridentifikasi dari hasil survey-survey yang dilakukan oleh pemerintah dan mencari solusi. Dalam proses pemberdayaan ini para warga terdampak penutupan lokalisasi guyangan bebas memberikan usulan, kritik, dan saran untuk mengatasi masalah mereka. Warga terdampak mengungkapkan berbagai permasalahan yang menjadi kendala mereka dalam memulai usaha secara langsung kepada agen pemberdaya. Kemudian pemerintah tetap mengusahakan solusi agar masalah mereka dapat teratasi.

Selain mengungkapkan permasalahan secara langsung, para warga terdampak juga mengutarakan kebutuhan dalam bentuk proposal untuk diusulkan ke kecamatan dan diajukan oleh kecamatan ke dinas sosial. Para warga terdampak telah mengutarakan secara rinci terkait kebutuhan dan kegiatan yang akan mereka lakukan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Dengan kebebasan menggunakan uang kompensasi mereka akan memiliki pandangan dan kesadaran serta kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan usaha mereka.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997). Hal tersebut menunjukkan masih ada rasa kurang percaya diri terhadap usaha yang mereka jalankan padahal kekuatan, peluang dan fasilitas sudah disediakan.

e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan

Dinas sosial kabupaten nganjuk sebagai SKPD pertama yang melakukan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan dengan menggunakan bantuan tenaga pendamping pelatihan yang dianggap sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai pemberi atas materi pelatihan yang telah diterapkan berupa rekomendasi pendampingan pelatihan serta menyusun daftar kebutuhan bahan utama, bahan pembantu dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan. Para pendamping pelatihan dalam menjalankan tugas melatih sesuai dengan materi

pelatihan yang dibutuhkan. Tenaga pendamping pelatihan ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam program pemberdayaan dimana harus ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Pelaksanaan program tersebut terdiri dari beberapa langkah kegiatan:

1) Pelaksanaan kegiatan

Agenda pelaksanaan pelatihan terdiri dari sambutan kemudian pelatihan selama beberapa hari dan kemudian monitoring. Kecamatan dan kelurahan juga turut melakukan pendampingan serta dari kesra yang melakukan monitoring. Dalam kegiatan pelatihan, selain diberikan pelatihan dasar berupa kemampuan teknis produksi kepada peserta latih sesuai dengan jadwal dan jenis pelatihan yang dipilih, juga diberikan motivasi berkaitan dengan kewirausahaan.

2) Pendataan peserta pelatihan

Dalam pelaksanaan pelatihan juga dilakukan pendataan melalui absensi kedatangan peserta pelatihan, yang meliputi nama dan alamat.

3) Monitoring pelatihan

Kegiatan monitoring dilakukan dengan mengikuti pelaksanaan dimasing-masing titik penyelenggaraan pelatihan, disiapkan formulir pemantauan, dengan ini diharapkan diperoleh data kehadiran peserta pelatihan, kehadiran tenaga pendamping pelatihan, kelengkapan peralatan dan bahan pelatihan, cara penyampaian materi pelatihan dan daya serap materi pelatihan dari para peserta pelatihan. Saat kegiatan pelatihan juga ada monitoring baik dari kecamatan maupun KESRA. KESRA memonitoring untuk di laporkan ke pemerintah kabupaten nganjuk.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak terkait yang meliputi pendamping pelatihan tertentu yang sudah terbukti berhasil. Kader pemberdayaan masyarakat, para camat dan lurah untuk turut berkontribusi dalam melakukan intervensi kepada peserta pelatihan. Semua pihak tersebut terlibat dalam pelaksanaan dan pemberian bantuan pasca pelatihan. Hasil penilaian yang menyatakan baik tersebut dapat menunjukkan partisipasi masyarakat dalam program ini juga baik. Salah satu prinsip pemberdayaan yakni adanya kolaborasi proses antara masyarakat yang diberdayakan dengan lembaga yang memberdayakan karena partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan merupakan sebuah keharusan yang menentukan keberhasilan program oleh keterlibatan masyarakat dimana setiap kelompok pasti memiliki aset yang dapat dikembangkan dalam proses pemberdayaan.

f. Tahap evaluasi

Kegiatan yang dilakukan pasca pelatihan adalah pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan akhir. Monitoring dilakukan disetiap kegiatan pemberdayaan mulai dari pelatihan, pembentukan kelompok, pendampingan kelompok, kelompok produktif. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dari kelompok usaha peserta latih dan memfasilitasi keluhan dan permasalahan yang berhubungan dengan para peserta pelatihan.

Kepada semua pihak yang terkait pelaksanaan pelatihan khususnya tenaga pendamping pelatihan, kader, perwakilan dari peserta pelatihan dilakukan suatu pertemuan koordinasi secara periodik dengan agen pemberdayaan masyarakat, yaitu dinas sosial. Pertemuan tersebut dilakukan baik secara terpisah ataupun secara bersama-sama guna membahas perkembangan pelaksanaan selama pelatihan maupun pasca pelatihan untuk mengetahui kendala dan hambatan selama pemberdayaan ini dilaksanakan. Dalam menganalisis kekurangan-kekurangan dalam usaha para peserta pelatihan. Kemudian dalam rapat koordinasi akan dibahas untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Pemantauan secara teratur mengenai perkembangan yang telah dihasilkan akan menjadi pertimbangan untuk proses pemberdayaan selanjutnya secara berkesinambungan.

Indikator keberhasilan program pemberdayaan ini mengacu pada perkembangan yang stabil selama bertahun-tahun.

g. Tahap terminasi (*dissanggement*)

Program pemberdayaan untuk warga terdampak penutupan lokalisasi guyangan ini sampai sekarang masih berjalan dan belum diakhiri. Dengan para peserta pelatihan yang memulai usaha baru mereka, dengan usaha baru yang mereka geluti ini pemerintah kabupaten nganjuk berharap besar kan kemandirian masyarakat yang muncul dengan memanfaatkan potensi yang ada. Tentunya dinas sosial juga berperan penting dalam proses pemberdayaan ini.

Seperti usaha ternak lele yang dijalankan oleh ibu retno, beliau merupakan salah satu contoh dari sekian banyak peserta pelatihan yang telah memulai usaha baru. Usaha yang semakin berkembang dari bulan ke bulan dianggap sudah mampu berkembang dan mandiri.

PENUTUP

Simpulan

Proses pemberdayaan bagi warga terdampak penutupan lokalisasi guyangan dikelurahan guyangan kecamatan bagor kabupaten nganjuk yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan telah berhasil membawa perubahan bagi kehidupan dikawasan ex-lokalisasi guyangan yang selama ini menjadi lahan penghasilan masyarakat guyangan dan sekitarnya menjadi lebih baik. Keberhasilan ini dilaksanakan melalui tujuh tahap pemberdayaan antara lain:

1. Tahap persiapan (*engagement*), adanya persiapan pelatihan yang dilakukan dengan baik oleh dinas sosial kabupaten nganjuk. Langkah-langkah persiapan internal yaitu menentukan tempat yang akan digunakan sebagai pelatihan peserta, sumber daya manusia yang meliputi tenaga pendamping yang sesuai dengan kriteria, kemudian terkait persiapan teknis seperti persiapan alat dan bahan yang akan digunakan, materi, dan lain-lain. Persiapan ini tidak memakan waktu yang lama.

2. Tahap pengkajian (*assessment*), telah dilakukan identifikasi kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki warga terdampak melalui kuisioner yang diberikan oleh

dinas sosial, sehingga sesuai dengan minat para warga terdampak.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (*designing*), alih profesi dan alih fungsi kawasan ex-lokalisasi guyangan yang dilakukan pemerintah merupakan program yang sudah terencana secara sistematis dan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan secara tidak langsung melalui survey yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu juga ada penyusunan rencana kelompok dimaksudkan agar kelompok dan anggotanya mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan yang konkrit dan realistis.

4. Tahap formulasi rencana aksi, selain mengungkapkan permasalahan secara langsung, para warga terdampak yang mendapatkan pelatihan mengungkapkan kebutuhan dalam bentuk proposal dengan menjabarkan secara rinci terkait kebutuhan mereka dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan visi dan misi mereka, dimana agen pemberdaya hanya mengambil posisi sebagai partisipan, stimulant, dan motivator.

5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan dengan dinas sosial sebagai agen pemberdayaan. Pelaksanaan program tersebut terdiri dari beberapa langkah kegiatan yaitu pelaksanaan pelatihan, pendataan peserta pelatihan, dan monitoring pelatihan.

6. Tahap evaluasi, kegiatan yang dilakukan pasca pelatihan adalah pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan akhir. Monitoring dilakukan disetiap kegiatan pemberdayaan mulai dari pelatihan, pembentukan kelompok, pendampingan kelompok, dan laporan akhir. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi terkait pengembangan dan memfasilitasi keluhan para peserta pelatihan. Kemudian pelaporan dilakukan secara teratur baik mingguan, bulanan, maupun tahunan.

7. Tahap terminasi (*dissanggement*, pemberdayaan masih terus berjalan sampai indikator keberhasilan tercapai secara keseluruhan baik kualitas produksi hingga manajemen usaha. Belum ada rencana melakukan terminasi dan tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok usaha tidak akan melepas meskipun sudah berdaya dan akan terus dipantau dan monitoring.

Hambatan yang dijumpai dilapangan lebih kepada kemauan dan keyakinan warga untuk dapat merubah hidupnya dan belum bisa beralih dari hegemoni pekerjaan lamayan dilokalisasi guyangan, rasa pesimis akan membuka usaha baru, dan lain-lain sehingga ketika mengikuti kegiatan pemberdayaan mereka kurang telaten dan bahkan ada yang berhenti mengikuti pelatihan. Bagaimana masyarakat bisa memandirikan dirinya dalam bidang ekonomi dan bisa segera mengatasi permasalahan mereka apabila mereka kurang ada rasa keinginan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas, motivasi, mengarahkan dan peran masyarakat turu memberikan dukungan untuk perubahan kawasan lokalisasi ex-guyangan.

Saran

Untuk mendorong keberhasilan pemberdayaan dan merubah kawasan ex-lokalisasi guyangan menjadi lebih berkembang, peneliti memberikan saran agar pemerintah kabupaten nganjuk:

1. Melakukan monitoring terhadap segala bantuan yang diberikan oleh pemerintah, agar sesuai dengan tujuan dan meminimalisir penyelewengan bantuan.
2. Memberikan *channeling* untuk permasalahan marketing pada kelompok yang membuka usaha baru, untuk mengembangkan usaha mereka, dan tentunya memberikan motivasi terhadap usaha apa yang mereka minati.
3. Pemerintah menggalakan operasi di ex-lokalisasi guyangan, agar mereka yang telah terdata menerima pelatihan dan kompensasi tidak lagi kembali pada pekerjaan lama di ex-lokalisasi.
4. Pemerintah seharusnya memberikan monitoring terkait dana kompensasi yang di berikan pada warga terdampak penutupan lokalisasi, harus ada batasan untuk apa dana tersebut di gunakan dan di berikan laporan agar jelas dana kompensasi di gunakan untuk kegiatan atau usaha apa.
5. Pemerintah juga harus memberikan monitoring pada setiap warga terdampak agar tidak kembali pada pekerjaan yang lama di lokalisasi Guyangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Agus Prastyawan S.Sos., M.Si. sebagai dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Farid Ma'aruf S.Sos., M.AP. sebagai dosen penguji dan terima kasih kepada Bapak Galih Wahyu Pradana S.AP., M.Si. sebagai dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Isabandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afifiddin dan Saebani, Bani Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; CV Pustaka Setia.
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan pasrtisipasi dan Penguatan Keputusan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Jokie, dkk. 2009. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*. Depok: PT. Malta Pritindo
- Kaswan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Mardikanto, Totok, dkk. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Muis, Saludin. 2007. *Pemikiran Teori Organisasi & Manajemen Antara Sun Tzu & kini*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ndraha, Talidzuhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soedjono D, 1973, *Patologi Sosial: Gelandangan, Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan kedua, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumber Peraturan :

- Buku Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum
- Buku Pedoman Perlengkapan Perpustakaan Umum
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

Sumber Jurnal :

- Baihakki Budhi, 2016. *Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Urban Farming Yayasan Bunga Melati Indonesia (YMBI) di Perigi Baru*. Skripsi. Jakarta. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Hidayatullah.
- Lobo, Albertina Nasri. 2008. *Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Kasus di Lokalisasi Tanjung Elmo Sentani oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah papua Propinsi Papua)*. Tesis. Jakarta. FISIP UI
- Parwata, S Yayan Alex. 2014. *Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi Terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014*. Skripsi. Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember
- Puspita, Resti. 2012. *Proses Pemberdayaan Komunitas Pemulung Melalui Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) Oleh Tim Penggerak PKK (studi Kasus Pada Komunitas Pemulung Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)*. Skripsi. Surabaya: FIS UNESA

Sumber Online :

- www.kemendagri.go.id diakses 02 Februari 2017
- [http://news.detik.com/jawatimur/2609816/sosiolog-khawatirkan-dampak-sosial-penutupan dolly](http://news.detik.com/jawatimur/2609816/sosiolog-khawatirkan-dampak-sosial-penutupan-dolly)
- http://www.kompasiana.com/imizona/inilah-dampak-penutupan-lokalisasi-pelacuran-di-surabaya_552c1d166ea834c65b8b4599